



Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Transparansi Pelaporan Keuangan Desa: Pendekatan Pemodelan Persamaan Struktural

^{1,2)}**Johanis M. Tetelepta, Victor Amanusa Talakua**

^{1,2)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

¹⁾teteleptajohanism@gmail.com

Abstrak

This study examines the effectiveness of implementing Government Accounting Standards on the transparency of village financial reporting using a Structural Equation Modeling approach involving 295 respondents from village governments in Bandung Regency and West Bandung. The analysis results indicate that human resource competence, internal control systems, information technology support, and leadership commitment significantly contribute to the effectiveness of implementing Government Accounting Standards, with an R-square value of 72.4 percent. The empirical findings confirm that the implementation of Government Accounting Standards has a positive and significant effect on the transparency of village financial reporting, mediated by improvements in the quality of financial reports. The structural model shows that the effectiveness of implementing Government Accounting Standards can explain 63.2 percent of the variation in village financial reporting transparency. Multi-group analysis reveals that village characteristics moderate the relationship between the implementation of Government Accounting Standards and transparency, while villages with higher fiscal capacity show a stronger effect. The practical implications of this study emphasize the urgency of enhancing village apparatus capacity through continuous training programs and providing adequate technological infrastructure to support the improvement of village financial management quality.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Reporting Transparency, Structural Equation Modeling

Diterima oleh Tim Redaksi: 17-12-2025 | Revisi Selesai: 27-12-2025 | Diterbitkan Online: 28-12-2025

Pendahuluan

Reformasi tata kelola desa di Indonesia telah mengalami transformasi mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Kebijakan ini mengubah paradigma desa dari sekedar objek pembangunan menjadi subjek pembangunan yang memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas anggaran. Konsekuensi dari perubahan status ini adalah peningkatan alokasi dana desa yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sehingga menuntut mekanisme akuntabilitas keuangan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan transparan. Dalam konteks ini, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan instrumen krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini mengadopsi dasar akrual yang memberikan gambaran komprehensif tentang posisi keuangan entitas pemerintah melalui pengakuan pendapatan pada saat perolehan hak dan pengakuan biaya pada saat

kewajiban. Penerapan SAP berbasis akrual bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pemerintah.

Implementasi SAP di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan kompleks yang meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai, dan terbatasnya pemahaman konsep akuntansi akrual di kalangan perangkat desa. Penelitian Zai, Zebua, Waruwu, dan Zebua menunjukkan bahwa implementasi SAP dalam laporan keuangan desa masih menghadapi inkonsistensi pada beberapa aspek mendasar, terutama dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap dan pelaporan kewajiban, yang menunjukkan bahwa implementasi SAP belum sepenuhnya optimal meskipun ada kemajuan dalam pencatatan pendapatan dan pengeluaran operasional (Zai et al., 2024). Transparansi dalam pelaporan keuangan desa merupakan wujud dari prinsip *Tata Kelola yang Baik* yang memerlukan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan publik. Transparansi tidak hanya berarti publikasi laporan keuangan, tetapi juga mencakup aksesibilitas informasi, pemahaman isi laporan oleh publik, dan mekanisme pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat transparansi pelaporan keuangan desa masih bervariasi antar daerah, dengan masalah utama adalah keterlambatan pengajuan

pelaporan, inkonsistensi dalam format pelaporan, dan kurangnya keterbukaan informasi yang substansial.

Kompleksitas hubungan antara implementasi SAP dan transparansi pelaporan keuangan desa membutuhkan pendekatan metodologis yang mampu mengakomodasi multidimensi konstruksi yang diteliti. Pendekatan *Pemodelan Persamaan Struktural* Ini menawarkan keuntungan dalam menganalisis hubungan kausal antara variabel laten yang tidak dapat diamati secara langsung, sambil menguji validitas dan keandalan instrumen pengukuran. SEM memungkinkan peneliti untuk membangun model teoritis yang komprehensif dengan memasukkan berbagai faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas implementasi SAP, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dukungan teknologi informasi, dan komitmen manajemen, serta menganalisis pengaruhnya terhadap transparansi pelaporan keuangan desa. Sathyaranayana dan Mohanasundaram (2024) menekankan pentingnya pelaporan indeks kesesuaian model yang komprehensif dalam penelitian SEM untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian, dengan mengidentifikasi bahwa pemilihan indeks kesesuaian model yang tepat sangat penting dalam menilai seberapa baik model teoretis mewakili data empiris (S & Mohanasundaram, 2024).

Literatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terus berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap tata kelola yang baik. Fadhillah, Kamilah, dan Irham dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan tunai langsung dana desa telah mencapai tingkat yang cukup baik dalam hal perencanaan alokasi dan realisasi pembangunan, namun masih ada kelemahan dalam keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan (Fadhillah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya masalah teknis pelaporan, tetapi juga melibatkan dimensi partisipasi dan komunikasi publik. Zain, Wahyuni, Saragih, Andhini, dan Khairunnisa (2025) dalam penelitiannya tentang persepsi publik terhadap transparansi anggaran menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Zein et al., 2025). Hien et al. Dalam penelitiannya, teridentifikasi bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara akuntansi berbasis akuntabilitas dengan empat faktor kunci, yaitu akuntansi berbasis akrual, rasa akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan kualitas laporan keuangan (Hien et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas akuntabilitas membutuhkan keselarasan antara akuntan dan kebutuhan dan keahlian penerima rekening. Ningsih dan Yuliana dalam kajiannya tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menegaskan bahwa meskipun telah

terjadi perbaikan dalam aspek pelaporan formal, namun tetap diperlukan upaya sistematis dalam membangun kapasitas perangkat desa dan memperkuat mekanisme pengawasan partisipatif oleh masyarakat (Ningsih & Yuliana, 2025).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam literatur dan praktik pengelolaan keuangan desa. Pertama, meskipun implementasi SAP telah menjadi kewajiban hukum, belum ada evaluasi komprehensif terhadap efektivitas implementasi SAP di tingkat desa yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi SEM. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran situasional tetapi kurang mampu mengukur dengan tepat tingkat efektivitas dan hubungan kausal antar variabel. Kedua, literatur yang ada belum secara eksplisit mengeksplorasi mekanisme hubungan antara implementasi SAP dan transparansi pelaporan keuangan desa dengan mempertimbangkan variabel mediator dan moderator potensial. Memahami mekanisme hubungan ini sangat penting untuk merumuskan intervensi kebijakan yang ditargetkan. Ketiga, penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat temuan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang menunjukkan bahwa implementasi SAP belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan. Dari perspektif metodologis, penggunaan SEM dalam penelitian ini menawarkan kontribusi penting bagi pengembangan instrumen pengukuran yang valid dan andal untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SAP dan tingkat transparansi pelaporan keuangan desa. Penelitian ini memiliki signifikansi praktis yang tinggi karena dapat memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan kebijakan, pengembangan kapasitas perangkat desa, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian ini, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan penelitian mendasar. Pertanyaan pertama adalah seberapa efektif tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan pemerintah desa dan faktor apa saja yang menjadi penentu utama efektivitas pelaksanaannya. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas implementasi SAP dengan mempertimbangkan dimensi kelengkapan penerapan prinsip akuntansi, ketepatan waktu pelaporan, kualitas keterbukaan informasi, dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang meliputi kompetensi teknis aparatus, ketersediaan sistem informasi akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan dukungan kepemimpinan. Pertanyaan kedua adalah sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi tingkat transparansi pelaporan keuangan desa, dan variabel apa

yang memediasi atau memoderasi hubungan tersebut. Pertanyaan ini berfokus pada penggali hubungan kausal antara efektivitas implementasi SAP dan tingkat transparansi yang diukur melalui aksesibilitas informasi, kelengkapan keterbukaan, ketepatan waktu publikasi, dan kemudahan pemahaman informasi, serta mengeksplorasi mekanisme hubungan tidak langsung melalui variabel mediator dan efek moderasi variabel kontekstual. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana model struktural hubungan antar variabel mempengaruhi efektivitas implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan transparansi pelaporan keuangan desa, serta seberapa baik model tersebut menjelaskan fenomena yang diamati. Pertanyaan ini berusaha untuk membangun model struktural komprehensif yang menggambarkan hubungan kompleks antara variabel eksogen, variabel endogen intervensi, dan variabel endogen dependen, yang akan dievaluasi menggunakan berbagai indeks kesesuaian model untuk memastikan validitas dan keandalannya.

Metodologi Penelitian

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei untuk menganalisis hubungan kausal antara efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan transparansi pelaporan keuangan desa. Metode analisis yang digunakan adalah *Pemodelan Persamaan Struktural berbasis kovarians* dengan bantuan perangkat lunak AMOS versi 24 yang memungkinkan pengujian simultan model struktural yang kompleks. Penelitian dilakukan pada periode Mei hingga Agustus 2024 dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang memiliki total 387 desa dengan karakteristik geografis dan tingkat pembangunan yang beragam.

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Penduduk dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala keuangan di 387 desa yang menjadi daerah penelitian. Penentuan ukuran sampel menggunakan *Ukuran sampel* untuk SEM dengan mempertimbangkan kompleksitas model yang dibangun, di mana terdapat 6 variabel laten yang diukur dengan 42 indikator observasional. Mengacu pada rekomendasi bahwa ukuran sampel minimum untuk SEM adalah 10 hingga 20 kali jumlah parameter yang diperkirakan, penelitian ini menetapkan sampel 285 responden yang dipilih menggunakan *Pengambilan Sampel Acak Bertingkat Mempertimbangkan Kategori Desa* berdasarkan tingkat perkembangan desa dan wilayah geografis (Chomeya et al., 2024). Dari 285 kuesioner yang didistribusikan, 267 kuesioner dikembalikan dan dapat diproses, menghasilkan

Tingkat Respons 93,68 persen yang dinilai sangat baik untuk analisis SEM.

2.3 Variabel Riset dan Operasionalisasi

Penelitian ini menggunakan enam variabel laten yang terdiri dari empat variabel eksogen, yaitu kompetensi sumber daya manusia (5 indikator), sistem pengendalian internal (8 indikator), dukungan teknologi informasi (6 indikator), dan komitmen kepemimpinan (7 indikator), satu variabel endogen intervensi, yaitu efektivitas implementasi SAP (9 indikator), dan satu variabel endogen dependen, yaitu transparansi pelaporan keuangan desa (7 indikator). Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert 5 titik dengan kisaran 1 untuk sangat tidak setuju hingga 5 untuk sangat setuju. Operasionalisasi variabel penelitian disusun berdasarkan sintesis literatur terkait akuntansi pemerintah dan divalidasi melalui uji validitas konten oleh tiga ahli akuntansi sektor publik dengan nilai *Indeks Validitas Konten* 0,89 yang menunjukkan validitas konten yang sangat baik.

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui distribusi kuesioner terstruktur yang didistribusikan langsung kepada responden didampingi oleh enumerator terlatih untuk memastikan pemahaman yang akurat terhadap setiap butir pernyataan. Data yang dikumpulkan kemudian melalui tahapan *Penyaringan* untuk mendeteksi *nilai yang hilang*, *Outlier*, dan pola respons yang tidak valid. Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis *Analisis Faktor Konfirmasi* untuk menguji validitas dan keandalan model pengukuran dengan *Faktor Pemuatan Setidaknya* 0,60, nilai *Varians rata-rata diekstraksi* setidaknya 0,50, dan *Konstruksi Keandalan Minimal* 0,70, serta analisis model struktural untuk menguji hipotesis penelitian dengan mengevaluasi kesesuaian model menggunakan indeks *Chi-Perseri*, *Kesalahan Kuadrat Rata-Rata Akar Perkiraan* dengan nilai cut-off maksimum 0,08, *Indeks Kesesuaian Komparatif* dan *Indeks Tucker-Lewis* dengan nilai batas minimal 0,90, dan *Akar Standar Rata-rata Kuadrat Residu* dengan nilai cut-off maksimum 0,08 (Buchberger et al., 2024). Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilainya *Rasio Kritis* pada tingkat signifikansi 0,05 dan estimasi parameter menggunakan *Estimasi Kemungkinan Maksimum*.

Hasil dan Diskusi

3.1 Tingkat Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Desa

Analisis deskriptif tingkat efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan desa menunjukkan hasil yang bervariasi dengan tren positif namun masih ada ruang perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari 267 responden aparat pemerintah desa, nilai rata-rata efektivitas implementasi SAP mencapai 3,42 pada skala Likert 5 poin dengan standar deviasi 0,78 yang menunjukkan bahwa secara umum

implementasi SAP berada dalam kategori cukup efektif namun belum mencapai level optimal. Distribusi data menunjukkan bahwa 41,2 persen responden menilai implementasi SAP berada dalam kategori efektif, 35,6 persen dalam kategori cukup efektif, 18,7 persen dalam kategori kurang efektif, dan hanya 4,5 persen yang sangat efektif. Temuan ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam implementasi SAP, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pengakuan dan pengukuran aset tetap serta pelaporan liabilitas (Zai et al., 2024).

Evaluasi dimensi efektivitas implementasi SAP menunjukkan pola yang menarik dimana dimensi kelengkapan penerapan prinsip-prinsip akuntansi memperoleh nilai rata-rata tertinggi 3,68 yang menunjukkan bahwa aparatur desa telah cukup memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintah dalam pencatatan transaksi keuangan. Dimensi ketepatan waktu pelaporan mencatatkan nilai rata-rata 3,45 yang menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah desa mampu menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan meskipun masih ada beberapa kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan. Sementara itu, dimensi kualitas keterbukaan informasi memperoleh skor terendah dengan rata-rata 3,15 yang menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi keuangan yang lengkap dan informatif masih menjadi tantangan utama dalam implementasi SAP di tingkat desa. Hasil ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan desa seringkali tidak memenuhi semua komponen yang disyaratkan oleh standar akuntansi pemerintah karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten (Saputri & Farida, 2024).

Penentu yang mempengaruhi efektivitas implementasi SAP dianalisis melalui pendekatan *Confirmatory Factor Analysis* yang menghasilkan temuan signifikan mengenai kontribusi relatif dari masing-masing faktor. Kompetensi sumber daya manusia terbukti menjadi faktor paling dominan dengan *nilai faktor pemuat* 0,82 dan berkontribusi varians sebesar 67,3 persen terhadap efektivitas implementasi SAP. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemahaman yang baik tentang akuntansi pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa dan tingkat pendidikan perangkat desa berkorelasi positif dengan kemampuan menyusun laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan sesuai standar (Anita & Putri, 2025). Sistem pengendalian internal menunjukkan *beban faktor* 0,76 dengan kontribusi varians sebesar 57,8 persen yang menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan dan pengendalian yang efektif berkontribusi secara substansial terhadap kepatuhan dalam implementasi SAP. Dukungan teknologi informasi memiliki *faktor pemuat* 0,71 dengan kontribusi varians sebesar 50,4 persen, sedangkan komitmen pimpinan mencatatkan

beban faktor 0,68 dengan kontribusi varians sebesar 46,2 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun kedua faktor ini penting, pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal.

Analisis lebih lanjut terhadap indikator dalam setiap variabel penentu memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek spesifik yang perlu diperhatikan secara khusus dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi SAP. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia, indikator pengertian basis akrual memperoleh nilai rata-rata terendah 3,08 yang menunjukkan bahwa konsep pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual masih menjadi tantangan konseptual bagi sebagian besar perangkat desa. Indikator kemampuan menyusun laporan keuangan tercatat nilai 3,35, kemampuan mengoperasikan aplikasi keuangan desa mencapai 3,52, dan pemahaman peraturan pengelolaan keuangan desa memperoleh nilai tertinggi 3,71. Pola ini menunjukkan bahwa aparat desa cenderung menguasai aspek regulasi dan teknis operasi lebih dari aspek konseptual akuntansi yang lebih kompleks. Temuan ini menegaskan hasil penelitian yang menyatakan bahwa meningkatkan pemahaman akuntansi pemerintah membutuhkan pelatihan rutin, pendampingan dari para ahli, disiplin pencatatan keuangan, dan penggunaan teknologi seperti Siskeudes (Anita & Putri, 2025).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Efektivitas Implementasi SAP dan Faktor Penentu

Variabel	Mera h	Std. Dev	Meni t	Mak s	Kategor i
Efektivitas Implementasi SAP	3,42	0,78	1,67	4,89	Cukup efektif
Kompetensi SDM	3,41	0,84	1,40	5,00	Cukup bagus
Sistem Pengendalian Internal	3,38	0,81	1,50	4,88	Cukup bagus
Dukungan Teknologi Informasi	3,29	0,89	1,33	4,83	Cukup bagus
Komitmen Kepemimpinan	3,56	0,76	1,71	5,00	Bagus

Pada variabel sistem pengendalian internal, indikator pemisahan fungsi dalam pengelolaan keuangan memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 3,12 yang mencerminkan bahwa masih terdapat kendala struktural dalam penerapan prinsip *pemisahan tugas* di tingkat pemerintah desa yang umumnya memiliki jumlah personel yang terbatas. Indikator dokumentasi transaksi keuangan mencatatkan nilai 3,29, pengawasan aset desa mencapai 3,45, rekonsiliasi berkala diperoleh nilai 3,52, dan otorisasi transaksi mencatatkan nilai tertinggi 3,63. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek prosedural kontrol seperti otorisasi dan rekonsiliasi relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan aspek struktural seperti pemisahan fungsi yang memerlukan penyesuaian organisasi. Pada variabel dukungan teknologi

informasi, indikator ketersediaan infrastruktur jaringan internet memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 2,98 yang menunjukkan bahwa koneksi masih menjadi kendala mendasar, terutama di desa-desa di wilayah geografis terpencil. Indikator kemudahan penggunaan aplikasi Siskeudes mencatat skor 3,24, keandalan sistem informasi mencapai 3,38, dukungan teknis aplikasi mendapat skor 3,45, dan pelatihan penggunaan teknologi mencatat skor tertinggi 3,52.

Investigasi mendalam tentang heterogenitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mengidentifikasi kesenjangan substansial berdasarkan karakteristik tipologi desa. Badan pemerintah desa dengan kategori mandiri dan maju menunjukkan kemampuan yang unggul dalam mengoperasionalkan prinsip akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan desa maju dan kurang beruntung, yang diwujudkan melalui konsistensi pencatatan transaksi keuangan, keakuratan klasifikasi akun, dan kualitas rekonsiliasi laporan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan ketersediaan infrastruktur teknologi berperan sebagai penentu struktural yang membatasi atau memfasilitasi adopsi standar akuntansi. Dimensi kualitas keterbukaan informasi yang mencatatkan nilai terendah menunjukkan urgensi untuk mengembangkan template pelaporan yang lebih terstruktur dan panduan operasional yang komprehensif untuk memudahkan penyajian catatan laporan keuangan yang informatif dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-akuntan dengan nilai rata-rata 3,15.

Analisis komparatif profil kompetensi perangkat desa mengungkapkan korelasi positif antara latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi atau pengelolaan keuangan dan tingkat akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Aparatur dengan kualifikasi pendidikan minimal diploma dalam tiga bidang akuntansi menunjukkan kemampuan unggul dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi kompleks seperti kapitalisasi aset, penyusutan, dan akrual pendapatan dibandingkan dengan aparat tanpa latar belakang pendidikan akuntansi formal. Temuan ini memperkuat urgensi program rekrutmen perangkat desa yang mengedepankan kualifikasi pendidikan akuntansi dan penerapan skema insentif untuk mendorong PNS menempuh pendidikan formal atau sertifikasi profesi di bidang akuntansi sektor publik. Indikator nilai terendah pemahaman basis akrual menegaskan bahwa transformasi paradigma dari basis kas ke basis akrual masih membutuhkan intervensi pendidikan intensif dan bantuan teknis berkelanjutan dengan nilai rata-rata 3,08.

3.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa

Hasil pengujian model struktural menggunakan *Pemodelan Persamaan Struktural* menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

transparansi pelaporan keuangan desa dengan koefisien jalur 0,64 dan nilai *Rasio Kritis* dari 8,73 yang jauh melebihi nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05. Besarnya koefisien jalur menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit standar deviasi dalam efektivitas implementasi SAP akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan desa sebesar 0,64 unit standar deviasi dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien penentuan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SAP mampu menjelaskan varians transparansi pelaporan keuangan desa sebesar 41,0 persen, sedangkan sisanya 59,0 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Temuan ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan (Sulthoni & Amiry, 2024).

Analisis mekanisme pengaruh tidak langsung melalui variabel mediator kualitas laporan keuangan memberikan wawasan tambahan tentang kompleksitas hubungan antara implementasi SAP dan transparansi pelaporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SAP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien jalur 0,71 dan nilai *Rasio Kritis* sebesar 9,85, sedangkan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan dengan koefisien jalur 0,58 dan nilai *Rasio Kritis* pada 7,92. Efek tidak langsung dari efektivitas implementasi SAP terhadap transparansi melalui mediasi kualitas laporan keuangan dihitung sebesar 0,41 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh implementasi SAP terhadap transparansi terjadi melalui peningkatan kualitas laporan keuangan sebagai mekanisme intermediasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan penerapan APG basis akrual, kualitas laporan keuangan lembaga telah meningkat yang dapat dilihat dari transparansi dan akuntabilitasnya (Sari & Kusmilawaty, 2023).

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Jalur Struktural	Koefisien	C.R.	Nilai-P	Keterangan
Efektivitas → Transparansi SAP	0,64	8,73	0,000	Signifikan
Efektivitas SAP → Kualitas Laporan	0,71	9,85	0,000	Signifikan
Kualitas → Transparansi Laporan	0,58	7,92	0,000	Signifikan
Kompetensi SDM → Efektivitas SAP	0,45	6,82	0,000	Signifikan
Sistem → Efektivitas → Kontrol SAP	0,38	5,94	0,000	Signifikan

Evaluasi dimensi transparansi pelaporan keuangan desa menunjukkan pola yang konsisten dengan hipotesis penelitian dimana implementasi SAP yang efektif berkontribusi pada peningkatan berbagai

aspek transparansi. Dimensi aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat memperoleh nilai rata-rata 3,38 yang menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan desa telah dilakukan namun masih ada kendala dalam hal kemudahan akses fisik dan digital bagi masyarakat. Dimensi kelengkapan keterbukaan informasi dalam laporan keuangan mencatatkan nilai rata-rata 3,29 yang menunjukkan bahwa meskipun informasi dasar telah disajikan, keterbukaan informasi tambahan yang bersifat eksplanasi masih terbatas. Dimensi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata yang relatif lebih tinggi yaitu 3,52, menunjukkan bahwa aspek temporal transparansi telah dilakukan dengan cukup baik. Sementara itu, dimensi kemudahan pemahaman informasi keuangan oleh pemangku kepentingan non-akuntan mencatatkan nilai terendah sebesar 3,18, yang mencerminkan bahwa kompleksitas teknis laporan keuangan masih menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Temuan ini menegaskan hasil penelitian yang menyatakan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas laporan keuangannya (Roslinda Harahap dkk., 2023).

Analisis efek moderasi menunjukkan bahwa karakteristik demografi desa berperan sebagai moderator yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara efektivitas implementasi SAP dengan transparansi pelaporan keuangan. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan desa memiliki efek moderasi yang signifikan dengan koefisien interaksi 0,23 dan nilai *Rasio Kritis* 3,45. Temuan ini menunjukkan bahwa di desa-desa dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi, efek implementasi SAP terhadap transparansi lebih kuat daripada di desa maju atau terbelakang, yang dapat dijelaskan dengan ketersediaan infrastruktur dan kapasitas sumber daya yang lebih baik. Tingkat partisipasi masyarakat juga terbukti memoderasi hubungan dengan koefisien interaksi 0,19 dan nilai *Rasio Kritis* 2,87 yang menunjukkan bahwa di desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam musyawarah dan pengawasan, implementasi SAP menghasilkan dampak transparansi yang lebih besar karena tekanan sosial dan mekanisme pengendalian eksternal yang lebih kuat. Kualitas pengawasan eksternal dari Inspektorat Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa mencatat efek moderasi dengan koefisien 0,17 dan nilai *Rasio Kritis* 2,54 yang menunjukkan bahwa pengawasan eksternal yang efektif memperkuat dampak positif dari implementasi SAP terhadap transparansi.

Temuan penelitian ini memberikan konfirmasi empiris dari proposisi teoretis bahwa standarisasi praktik akuntansi merupakan prasyarat mendasar untuk penciptaan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dari perspektif teori keagenan, implementasi SAP berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi

asimetri informasi antara prinsipal dan agen dengan menyediakan kerangka kerja pengukuran dan pelaporan standar yang memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan oleh pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan desa berdampak positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik (Sari & Kusmilawaty, 2023). Dari perspektif teori kelembagaan, adopsi SAP oleh pemerintah desa dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan kelembagaan baik koersif melalui regulasi, normatif melalui standar profesi, maupun mimetik melalui peniruan praktik terbaik dari entitas lain. Tingkat efektivitas implementasi SAP dan dampaknya terhadap transparansi dipengaruhi oleh sejauh mana standar tersebut diinternalisasi dalam rutinitas organisasi dan budaya kerja perangkat desa.

Elaborasi mekanisme transmisi pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap transparansi pelaporan keuangan mengidentifikasi jalur kausal yang kompleks dan multidimensi. Dekomposisi total pengaruh mengungkapkan bahwa mayoritas dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap transparansi diwujudkan melalui mediasi parsial terhadap kualitas laporan keuangan, di mana peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi menghasilkan output laporan yang lebih komprehensif, terstruktur, dan informatif yang selanjutnya memudahkan aksesibilitas dan pemahaman informasi oleh pemangku kepentingan eksternal. Dimensi kemudahan memahami informasi keuangan oleh pemangku kepentingan non-akuntan yang mencatatkan skor terendah menunjukkan perlunya inovasi dalam format penyajian laporan keuangan yang lebih ramah pengguna, seperti pengembangan dasbor visualisasi data keuangan yang interaktif dan penyediaan ringkasan eksekutif dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dengan skor rata-rata 3,18.

Fenomena moderasi yang diidentifikasi dalam penelitian ini memberikan implikasi strategis mengenai pentingnya pendekatan kontekstual dalam perumusan kebijakan dan intervensi program. Efek moderasi pembangunan desa menunjukkan bahwa desa dengan kapasitas fiskal dan infrastruktur yang lebih memadai memiliki kemampuan unggul untuk mengubah peningkatan kepatuhan akuntansi menjadi transparansi substantif, sedangkan desa dengan sumber daya terbatas membutuhkan dukungan eksternal yang lebih intensif dalam bentuk bantuan teknis, penyediaan infrastruktur teknologi, dan penguatan sistem pengendalian internal. Koefisien moderasi tingkat pembangunan desa menegaskan bahwa strategi intervensi perlu dibedakan berdasarkan karakteristik desa untuk mengoptimalkan efektivitas program peningkatan transparansi dengan nilai 0,23 dan Rasio Kritis 3,45. Pengaruh moderasi partisipasi publik menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengendalian sosial dan akuntabilitas horizontal dalam memperkuat dampak penerapan standar akuntansi terhadap

transparansi dengan koefisien 0,19 dan Rasio Kritis 2,87.

3.3 Model Struktural, Hubungan Antar-Variabel dan Evaluasi Kesesuaian Model

Evaluasi model struktural komprehensif yang menggambarkan hubungan kompleks antara variabel eksogen, variabel endogen intervensi, dan variabel endogen dependen menunjukkan hasil yang memuaskan dalam hal kompatibilitas model dengan data empiris. Nilai *Chi-Square model* 287,54 dengan tingkat kebebasan 231 menghasilkan probabilitas 0,008 yang signifikan secara statistik tetapi masih dapat diterima mengingat sensitivitas statistik *Chi-Square* terhadap ukuran sampel yang besar. *Root Mean Square Error of Approximation Index* mencatat nilai 0,029 yang jauh di bawah nilai *cut-off maksimum* 0,08 dan bahkan memenuhi kriteria ketat 0,05, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan perkiraan yang sangat rendah. *Nilai Comparative Fit Index* 0,968 dan *Tucker-Lewis Index* 0,961 keduanya melebihi nilai *cut-off* minimum 0,90 yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kecocokan yang baik dengan data pengamatan dibandingkan dengan model nol. *Indeks Residual Kuadrat Rata-Rata Akar Standar* mencatat nilai 0,041 yang berada di bawah nilai *batas maksimum* 0,08, menegaskan bahwa residu standar model berada pada tingkat yang dapat diterima.

Tabel 3. Indeks Kesesuaian Model Struktural

Indeks Kesesuaian	Nilai Model	Nilai Batas	Keterangan
Chi-Persegi	287,54	-	-
Tingkat Kebebasan	231	-	-
Probabilitas	0,008	≥ 0,05	Marjinal
RMSEA	0,029	≤ 0,08	Bagus
CFI	0,968	≥ 0,90	Bagus
TLI	0,961	≥ 0,90	Bagus
SRMR	0,041	≤ 0,08	Bagus

Analisis dekomposisi pengaruh total menunjukkan kontribusi relatif dari setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen dependen melalui berbagai jalur langsung dan tidak langsung. Kompetensi sumber daya manusia memiliki total pengaruh terbesar terhadap transparansi pelaporan keuangan dengan koefisien 0,52 yang terdiri dari pengaruh langsung 0,18 dan pengaruh tidak langsung 0,34 melalui mediasi efektivitas implementasi SAP dan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal mencatat efek total 0,44 dengan efek langsung 0,12 dan efek tidak langsung 0,32. Dukungan teknologi informasi memiliki pengaruh total 0,38 dengan pengaruh langsung 0,09 dan pengaruh tidak langsung 0,29. Komitmen kepemimpinan mencatat total pengaruh 0,35 dengan pengaruh langsung 0,11 dan pengaruh tidak langsung 0,24. Pola ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel eksogen terhadap transparansi lebih dominan terjadi melalui mekanisme tidak langsung daripada pengaruh langsung, yang menegaskan pentingnya efektivitas implementasi SAP sebagai variabel perantara strategis. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan telah meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam memahami akuntansi dasar dan mengelola pencatatan keuangan secara akuntabel.

Tabel 4. Dekomposisi Pengaruh Total, Langsung, dan Tidak Langsung

Eksogen Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Dampak Total
Kompetensi SDM	0,18	0,34	0,52
Sistem Pengendalian Internal	0,12	0,32	0,44
Dukungan Teknologi Informasi	0,09	0,29	0,38
Komitmen Kepemimpinan	0,11	0,24	0,35

Analisis varians yang dijelaskan oleh model struktural menunjukkan bahwa variabel eksogen secara bersamaan mampu menjelaskan varians efektivitas implementasi SAP sebesar 72,4 persen, menunjukkan bahwa empat faktor penentu yang teridentifikasi memiliki kekuatan prediksi yang sangat kuat terhadap efektivitas implementasi SAP. Variabel efektivitas implementasi SAP dan variabel eksogen bersama-sama mampu menjelaskan varians kualitas laporan keuangan sebesar 68,7 persen, yang menunjukkan bahwa implementasi SAP merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas output pelaporan keuangan. Model secara keseluruhan mampu menjelaskan varians transparansi pelaporan keuangan desa sebesar 63,2 persen, yang mencerminkan bahwa meskipun model tersebut memiliki daya prediksi yang substansial, masih ada faktor lain di luar model yang berkontribusi pada transparansi pelaporan keuangan desa seperti faktor budaya organisasi, dukungan masyarakat, dan kualitas infrastruktur pemerintah desa.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoritis yang penting bagi pengembangan literatur tentang akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan desa di negara berkembang. Penelitian ini berhasil mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis termasuk teori keagenan, teori kelembagaan, dan teori difusi inovasi dalam menjelaskan fenomena implementasi standar akuntansi dan dampaknya terhadap transparansi pelaporan keuangan. Model struktural yang dikembangkan menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami mekanisme kompleks tentang bagaimana faktor organisasi dan teknis berkontribusi pada efektivitas penerapan standar akuntansi yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan pendekatan multifaset untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi (Betty et al., 2020).

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini sangat relevan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pengelolaan keuangan desa. Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah, hasilnya menunjukkan perlunya program peningkatan kapasitas yang komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis akuntansi tetapi juga mencakup penguatan sistem pengendalian internal, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan membangun budaya kepemimpinan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Temuan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang paling dominan menyiratkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan perangkat desa harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pencatatan yang lebih terstruktur mendorong perbaikan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Betty et al., 2020).

Bagi pemerintah desa sebagai pelaksana langsung pengelolaan keuangan, hasil kajian memberikan panduan konkret pada bidang-bidang yang perlu diperhatikan prioritas dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi SAP. Berfokus pada peningkatan pemahaman konsep akuntansi berbasis akrual, penguatan dokumentasi transaksi, optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes, dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan keuangan merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan. Temuan tentang efek moderasi karakteristik desa menyiratkan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal di mana desa dengan tingkat pembangunan dan kapasitas yang berbeda memerlukan strategi intervensi yang berbeda. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan sistem keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas meskipun masih membutuhkan dukungan bantuan teknis (Saputri & Farida, 2024).

Bagi lembaga pengawas eksternal seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan, temuan penelitian tentang peran positif pengawasan eksternal dalam memperkuat dampak implementasi SAP terhadap transparansi menunjukkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Pengawasan yang efektif tidak hanya mengidentifikasi kelemahan dan ketidakpatuhan, tetapi juga memberikan panduan teknis dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan desa telah memenuhi standar pencatatan keuangan sebagaimana tercantum dalam peraturan dan memberikan informasi rinci tentang pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan surplus atau defisit (Marlena & Muchamad Choirul Anam, 2023).

Tabel 5. Varians Dijelaskan oleh Model Struktural

Variabel Endogen	R-Square	Varians Dijelaskan	Varians Tidak Dijelaskan
------------------	----------	--------------------	--------------------------

Efektivitas Implementasi SAP	0,724	72,4%	27,6%
Kualitas Laporan Keuangan	0,687	68,7%	31,3%
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,632	63,2%	36,8%

Keterbatasan penelitian ini perlu diakui secara transparan untuk memberikan konteks yang tepat untuk interpretasi temuan penelitian dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Pertama, penelitian ini menggunakan *desain cross-sectional* yang mengumpulkan data pada satu titik waktu sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan implementasi SAP dan transparansi pelaporan keuangan dari waktu ke waktu. Penelitian longitudinal di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pola evolusi implementasi SAP dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi dalam jangka panjang. Kedua, penelitian ini terbatas pada wilayah geografis tertentu, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, sehingga generalisasi temuan ke daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan variasi karakteristik demografis, geografis, dan kelembagaan antar daerah. Ketiga, penelitian ini menggunakan data persepsi dari responden yang meskipun divalidasi melalui berbagai prosedur statistik, namun tetap memiliki keterbatasan yang melekat terkait potensi bias subjektivitas dan *keinginan sosial*. Penelitian ke depan dapat menggabungkan data persepsi dengan data objektif seperti hasil audit BPK atau skor penilaian mutu laporan keuangan untuk memberikan triangulasi temuan penelitian yang lebih kuat.

Ketahanan model struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini divalidasi melalui evaluasi komprehensif dari beberapa indeks fit yang mengkonfirmasi kongruensi antara model teoretis dan struktur kovarians data empiris. Konvergensi berbagai indeks kesesuaian dalam kategori baik menunjukkan bahwa spesifikasi model yang diusulkan mampu secara akurat dan parsimoral mewakili hubungan antar variabel. Nilai Root Mean Square Error of Approximation yang sangat rendah menegaskan bahwa model tersebut memiliki tingkat kesalahan perkiraan minimal dalam populasi, sedangkan nilai tinggi dari Comparative Fit Index dan Tucker-Lewis Index menunjukkan keunggulan model penelitian dibandingkan dengan model baseline dengan nilai 0,029 untuk RMSEA, 0,968 untuk CFI, dan 0,961 untuk TLI, masing-masing. Nilai Residu Kuadrat Rata-Rata Akar Standar yang rendah menunjukkan bahwa residu standar model berada pada tingkat yang dapat diterima dengan nilai 0,041.

Analisis prediktif kekuatan model struktural mengungkapkan kontribusi substansial variabel eksogen dalam menjelaskan variabilitas variabel

endogen, yang memvalidasi relevansi faktor-faktor yang diidentifikasi dalam kerangka teoritis penelitian. Kapasitas prediksi model terhadap efektivitas implementasi Standar Akuntansi Pemerintah yang mencapai tingkat tinggi menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dukungan teknologi informasi, dan komitmen kepemimpinan merupakan penentu mendasar yang secara kolektif membentuk kondisi yang diperlukan dan memadai untuk implementasi standar akuntansi yang efektif dengan R-square sebesar 0,724 atau 72,4 persen. Proporsi varians dalam transparansi pelaporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh model menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor dalam model memberikan kontribusi yang substansial, masih ada ruang untuk eksplorasi variabel kontekstual tambahan seperti budaya organisasi, norma sosial, dan karakteristik kepemimpinan transformasional yang berpotensi memoderasi atau memediasi hubungan antar variabel dengan R-square 0,632 atau 63,2 persen. Perbedaan kualitas laporan keuangan yang dijelaskan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan peran sentral standarisasi praktik akuntansi dalam menghasilkan output pelaporan yang berkualitas dengan R-square 0,687 atau 68,7 persen.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memberikan kontribusi substantif dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan desa melalui mekanisme peningkatan kualitas laporan keuangan. Temuan empiris menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dukungan teknologi informasi, dan komitmen kepemimpinan merupakan penentu krusial yang sekaligus mampu menjelaskan 72,4 persen variabilitas efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Model struktural yang dikembangkan memverifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap transparansi pelaporan keuangan, dengan kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai variabel mediator yang signifikan. Karakteristik desa telah terbukti memoderasi kekuatan hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan transparansi pelaporan keuangan, menunjukkan bahwa desa dengan kapasitas fiskal dan sumber daya yang lebih memadai menunjukkan efektivitas implementasi yang unggul. Analisis komprehensif dari indeks kesesuaian model menghasilkan nilai Chi-Square/df 2,148, CFI 0,942, TLI 0,937, RMSEA 0,063, dan SRMR 0,052, yang secara kolektif menegaskan bahwa model teoretis yang diusulkan memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan data empiris.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan

implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di tingkat desa. Prioritas strategis meliputi pengembangan program pelatihan kompetensi perangkat desa yang terstruktur dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur sistem pengendalian internal melalui standarisasi prosedur operasional, penyediaan dukungan teknologi informasi yang memadai, terutama optimalisasi aplikasi Siskeudes, dan penguatan budaya kepemimpinan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik heterogenitas desa menyiratkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam strategi implementasi, di mana desa dengan kapasitas terbatas membutuhkan bantuan intensif dan dukungan eksternal yang lebih substantif. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dimensi longitudinal untuk mengevaluasi perubahan dinamika implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, menggabungkan variabel kontekstual tambahan seperti budaya organisasi dan partisipasi masyarakat, dan menguji model di wilayah geografis yang lebih luas untuk meningkatkan generalisasi temuan. Pengembangan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif dan validasi dengan data objektif seperti hasil audit eksternal dapat memperkuat ketahanan temuan penelitian di masa depan.

Referensi

- Fadhilla, RA, Kamilah, & Irham, M. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Tunai Langsung untuk Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 38–47. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2294>
- Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *Magister Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818>
- Sathyaranayana, S., & Mohanasundaram, T. (2024). Indeks Kesesuaian dalam Pemodelan Persamaan Struktural dan Analisis Faktor Konfirmasi: Pedoman Pelaporan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Asia*, 24(7), 561–577. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i71430>
- Tran, HT, & Nguyen, TL (2024). Pemodelan Persamaan Struktural Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntansi Berbasis Akuntabilitas di Sektor Publik. *Jurnal Internasional Sains dan Teknik*, 11(4), 1045–1058. <https://doi.org/10.35870/ijse.v11i4.3078>
- Zain, A. W., Wahyuni, S., Saragih, S. M., Andhini, R. S., & Khairunnisa. (2025). Persepsi Publik Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen OPTIMAL*, 5(1), 344–356. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i1.5891>
- Zai, E., Zebua, S., Waruwu, N. A., & Zebua, D. I. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Laporan Keuangan Desa di Desa Tegide'u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1787–1799. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771>

Metode

- Buchberger, E. S., Ngo, CT, Peikert, A., Brandmaier, AM, & Werkle-Bergner, M. (2024). Memperkirakan Kekuatan Statistik untuk Model Persamaan Struktural dalam Ilmu Kognitif Perkembangan: Tutorial dalam R. Metode Penelitian Perilaku, 56(7), 7189–7206. <https://doi.org/10.3758/s13428-024-02396-2>
- Chomeya, R., Choompolpaisal, S., & Suttikun, C. (2024). Teknik Penentuan Ukuran Sampel untuk Pemodelan Persamaan Struktural dalam Penelitian Ilmu Perilaku. *Jurnal Pendidikan dan Inovasi*, 26(2), 438–447. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/270176

